



RENJA

RENCANA KERJA
TAHUN 2022



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan berkah karunia-NYA penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dapat diselesaikan.

Penyusunan Renja ini bentuk realisasi komitmen Dinas Kominfo dalam menjalankan kewajiban sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Dinas Kominfo merupakan operasionalisasi pelaksanaan 3 (tiga) urusan pemerintah daerah yaitu komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.

Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak baik internal maupun eksternal dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ini, semoga Allah ridha atas ikhtiar kita semua, Amin.

Rembang, September 2021

Plt. KEPALA DINASKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
KABAG ORGANISASI



AFAN MARTADJAP., Msi
Pembina Tk. I
NIP. 19750621 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2017- 2021.....	11
2.2 Analisis Kinerja Layanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	22
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG.....	26
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	28
3.3 Program Dan Kegiatan.....	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	31
BAB V PENUTUP.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel 1 : Program dan Kegiatan 2020 dan 2021.....	11
Tabel 2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang s/d Tahun 2021.....	13
Tabel 3	Perubahan Indikator Kinerja Dinas Kominfo.....	19
Tabel 4	Capaian kinerja Dinas Kominfo tahun 2020.....	21
Tabel 5	Strategi dan Kebijakan.....	24
Tabel 6	Usulan Dari Pemangku Kepentingan.....	25
Tabel 7	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	28
Tabel 8	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	29
Tabel 9	Rencana Kerja dan Pendanaan.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan di atasnya. Renja Dinas Kominfo tahun 2022 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2026. Namun saat ini Kabupaten Rembang memasuki masa transisi pergantian Bupati dan Wakil Bupati sehingga RPJMD 2022-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026 OPD belum disahkan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Dinas Kominfo 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Aspek penting dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Kominfo adalah menjaga artikulasi dengan dokumen perencanaan lainnya dalam hal tujuan, sasaran, program dan kegiatan baik secara vertikal, horizontal dan diagonal. Aspek inilah yang menjadi tolok ukur konsep pembangunan berkelanjutan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Renja Dinas Kominfo telah melalui rangkaian proses panjang sebagaimana petunjuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan menelaah seluruh dokumen terkait, memperhatikan isu nasional, regional dan isu lintas sektoral.

Rancangan Akhir Renja Dinas Kominfo memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian. Target yang menjadi acuan kinerja Dinas Kominfo merupakan *cascading* dari RKPD 2022 dan RPJPD 2005-2025 sehingga secara efektif dapat berkontribusi langsung kepada pencapaian target kinerja daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2018);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah untuk :

1. Menentukan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan urusan Kominfo, Persandian dan Statistik Tahun 2022.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan urusan Kominfo, Persandian dan Statistik Tahun 2022.

Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Landasan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Landasan penyusunan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
3. Tolok ukur capaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Rembang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Akhir Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang disusun sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada Lampiran VI sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfo Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2019 dan 2020
- 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Renja Dinkominfo 2020

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinkominfo

3.2 Strategi dan Kebijakan Dinkominfo

BAB IV Rencana Kerja Pendanaan

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Evaluasi pelaksanaan Renja 2020 dan perkiraan capaian Renja tahun 2021 merupakan akhir dari periode Renstra Dinas Kominfo 2016-2021. Evaluasi ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kesesuaian tentang rumusan indikator, kebijakan, strategi pelaksanaan program dan kegiatan hingga capaian kinerja dalam kerangka pembangunan daerah melalui kontribusi urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian. Selain itu, juga memberikan informasi tingkat efektifitas dan efisiensi strategi pencapaian kinerja, untuk menentukan strategi yang tepat di Renja 2022 serta Renstra 2022-2026.

Renja 2020 dan 2021 Dinas Kominfo Kabupaten Rembang melaksanakan 7 (tujuh) program yang terdiri dari

- a. 3 (tiga) program penunjang (sekretariat),
- b. 2 (dua) program urusan komunikasi dan informatika,
- c. 1 (satu) program urusan statistik dan
- d. 1 (satu) program urusan persandian.

Masing-masing program diuraikan ke dalam kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1 : Program dan Kegiatan 2020 dan 2021

NO.	Program / Kegiatan	Urusan
A	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Penunjang
1	Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	
4	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	
B	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
C	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Penunjang
1	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	
D	Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik	Kominfo
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	
2	Pembinaan Layanan Kehumasan	
E	Program Pengembangan E-Government	Kominfo
1	Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan E-Government	
F	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Statistik

NO.	Program / Kegiatan	Urusan
1	Penyusunan Data Statistik	
G	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Persandian
1	Pengelolaan Persandian Daerah	

Tabel 2 :
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang s/d Tahun 2021

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM		PERKIRAAN REALISASI KINERJA PROGRAM		Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021)	STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai)
			2015	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14
1	Urusan Umum								
1	Urusan Sekretariat								
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah								
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum (Formulasi : Jumlah pelayanan umum yang dilaksanakan/jumlah pelayanan umum yang ada) X 100%	-	90	95	90	90	94,74	Akan Tercapai

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM		PERKIRAAN REALISASI KINERJA PROGRAM		Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021)	STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai)
			2015	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur (Formulasi : Jumlah sarana prasarana yang tercukupi/jumlah sarana prasarana yang ditargetkan) X 100%	-	90	95	90	90	94,74	Akan Tercapai
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian (Formulasi : Jumlah Pelayanan Kepegawaian yang terpenuhi/Jumlah pelayanan kepegawaian yang wajib dipenuhi) x 100%	-	90	95	90	90	94,74	Akan Tercapai
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan (Formulasi : Jumlah Pelayanan keuangan yang terpenuhi/Jumlah pelayanan keuangan yang wajib dipenuhi) x 100%	-	90	95	90	90	94,74	Akan Tercapai

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM		PERKIRAAN REALISASI KINERJA PROGRAM		Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021)	STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai)
			2015	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100%	-	65	70	65	65	92,86	Akan Tercapai

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM		PERKIRAAN REALISASI KINERJA PROGRAM		Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021)	STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai)
			2015	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14
	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik								
		Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100%	-	90	95	91	95	94,7	Akan Tercapai

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM		PERKIRAAN REALISASI KINERJA PROGRAM		Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021)	STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai)
			2015	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14
2	Urusan Komunikasi dan Informatika								
	Program Pengembangan <i>E-Government</i>								
		Persentase komponen layanan SPBE yang sudah terintegrasi	-	2,75	2,85	2,78	2,78	97,54	Akan Tercapai
	Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik								
		Persentase OPD yang menyajikan data yang lengkap	-	100	100	100	100	100,00	Tercapai

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM		PERKIRAAN REALISASI KINERJA PROGRAM		Capaian RPJMD 2020 (Realisasi 2020 berbanding dengan target 2021)	STATUS Akhir RPJMD (Perlu Upaya Keras/Akan Tercapai/Tercapai)
			2015	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14
3	Urusan Statistik								
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral								
		Persentase Publikasi Data Statistik Yang Tersusun	-	90	95	100	100	105,26	Tercapai
4	Urusan Persandian								
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah								
		Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	-	100	100	100	100	100,00	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas capaian Renja 2020 Dinas Kominfo dapat hampir seluruhnya dapat direalisasikan. Kemudian tingkat capaian terhadap target Renstra seluruhnya >90%.

Faktor-faktor pendukung capaian Renja Dinas Kominfo adalah :

1. Meningkatnya kapasitas SDM.
2. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah yang lain.
3. Intensifikasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja tahun 2020 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RPJMD Kabupaten Rembang. Pada tahun 2019 Renstra Dinas Kominfo mengalami perubahan dengan mengacu pada perubahan RPJMD 2016-2021. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan pada formulasi indikator kinerja Dinas Kominfo sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3: Perubahan Indikator Kinerja Dinas Kominfo

No	2016-2019	2020-2021
	Indikator Kerja	Indikator Kerja
1	Skor Pegi (Pemeringkatan e-Government)	Indeks SPBE
2	-	SAKIP OPD
3	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	-
4	a. Persentase PD telah memiliki website aktif b. Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan	a. Persentase Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tanggap dan transparan b. KIP
5	Persentase surat / santel yang dikelola	Indeks KAMI

Perubahan tersebut ada beberapa indikator yang tidak bisa dibandingkan tingkat keberhasilan capaian kinerjanya dengan indikator lama. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dilihat perbandingan perubahan formulasi indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Skor Pegi berubah sesuai dengan ketentuan dari Kementerian PAN menjadi Indeks SPBE namun masih relevan untuk diperbandingkan capaian kinerjanya.
2. Nilai SAKIP pada 2020-2021 tidak ada pembandingnya pada dokumen Renstra 2016-2019.
3. Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan 2016-2019 tidak ada pembandingnya pada 2020-2021.
4. Persentase perangkat daerah telah memiliki website dan aktif Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan mengalami formulasi baru dengan indikator baru namun masih relevan karena substansi proses dan bentuk layanan masih sama.
5. Persentase surat/sandi dan telekomunikasi yang dikelola mengalami perubahan formulasi dan ini tidak relevan untuk diperbandingkan karena berbeda substansi proses dan layanan.

Berdasarkan analisis perubahan indikator tersebut maka tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2020 hanya dapat dibandingkan 2 kelompok indikator kinerja saja dengan tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4 : Capaian kinerja Dinas Kominfo tahun 2020

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(3)
1	Indeks SPBE			3,20	2,75	2,85	2,90	2,78	3,11	2,85	2,90	
	Indeks KAMI			-	2,75	2,85	2,90	-	2,80	2,85	2,90	
2	KIP			70	80	85	90	52,9	93,4	85	90	

Capaian kinerja Dinas Komunikas dan Informatika dengan 3 indikator sebagaimana tersebut dalam tabel 2 rata-rata diatas 100% melampaui target yang telah ditetapkan. Namun dengan melihat perkembangan dari tahun ke tahun bahwa, variabel skoring kinerja masing-masing indikator mengalami penajaman dan perluasan cakupan. Hal ini disebabkan dinamika pengembangan teknologi informasi sangat cepat sehingga menuntut pemerintah mendorong seluruh pemerintah daerah melakukan penyesuaian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Melihat kondisi tersebut maka kedepan Dinas Kominfo memiliki tantangan yang berat dalam menunjang kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Rembang.

Faktor-faktor pendukung capaian pelayanan Dinas Kominfo adalah :

1. Kesadaran penyediaan informasi publik dari seluruh OPD mendukung pencapaian Keterbukaan Informasi Publik.
2. Meningkatnya penyediaan layanan publik berbasis sistem elektronik yang terintegrasi mendukung pencapaian SPBE.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pelayanan publik saat ini bukan hanya merupakan tren namun sebuah kebutuhan sekaligus tuntutan. Kemudahan dan kecepatan akses pelayanan publik berbasis sistem elektronik merupakan nilai tambah yang sangat menguntungkan baik pemerintah selaku penyelenggara maupun masyarakat. Untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan kerangka kebijakan pembangunan sistem elektronik melalui Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kabupaten Rembang. Banyak aspek dan keterlibatan banyak pihak (perangkat daerah) yang diatur dalam Peraturan Bupati tersebut. Oleh karena itu, tantangan dalam pelaksanaannya adalah mengakselerasi dan mengelaborasi peran seluruh *stake holder* sesuai tugas dan fungsi masing-masing meskipun Dinas Kominfo berperan sebagai *leading sector*.

Sebagai langkah awal pelaksanaan Perbup tersebut, pada tahun 2021 akan disusun dokumen *Masterplan Smart City* Kabupaten Rembang yang akan menjadi pedoman arah pembangunan SPBE. Konsep kabupaten cerdas (*smart city*) merupakan representasi kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan meliputi : pemerintahan cerdas (*smart governance*), kawasan cerdas (*smart branding*), ekonomi cerdas (*smart economy*), kualitas hidup yang cerdas (*smart living*), masyarakat pintar (*smart society*), dan lingkungan cerdas (*smart environment*). Hal fundamental dalam mewujudkan *smart city* adalah kesiapan baik pemerintah dan masyarakat dalam memahami konsep ini secara operasional. *Smart city* bukan hanya seputar kesiapan teknologi saja namun banyak aspek yang harus diperhatikan misalnya tata kelola, sumber daya manusia, infrastruktur dan lain-lain.

Hal lain yang menyertai konsep *smart city* adalah bahwa akan terjadi perubahan fundamental dalam pola interaksi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di berbagai bidang. Perlu dipersiapkan langkah-langkah pengendalian agar dapat mengoptimalkan peran masing-masing dan meminimalkan dampak buruk kemajuan teknologi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

a. Identifikasi Program/Kegiatan Yang Tercantum Rancangan Awal RKPD.

Hasil identifikasi dari program/kegiatan Dinkominfo Kabupaten Rembang semua telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD.

b. Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

Dari hasil pencermatan internal terdapat adanya perbedaan antara anggaran yang diusulkan (ideal) dengan anggaran pada rancangan RKPD. Walaupun adanya efisiensi anggaran tetapi tidak mengurangi target berdasarkan hasil pembahasan perencanaan kerja.

Tabel 5 :

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021 Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog / Keg	Loka si	Indika- tor Kinerja	Target Capaian	Kebutuh- an Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkominfo Kab. Rembang	Persentase ketercapaian pelayanan umum	100%	5.384.188.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkominfo kab. Rembang	Persentase ketercapaian pelayanan umum	100%	5.384.188.000	
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinkominfo Kab. Rembang	Persentase OPD yang menyajikan data lengkap	100%	897.000.000	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinkominfo kab. Rembang	Persentase OPD yang menyajikan data lengkap	100%	897.000.000	
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Dinkominfo Kab. Rembang	Persentase komponen layanan SPBE yang sudah terintegrasi	100%	2.750.000.000	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Dinkominfo kab. Rembang	Persentase komponen layanan SPBE yang sudah terintegrasi	100%	2.750.000.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinkominfo Kab. Rembang	Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	100%	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinkominfo kab. Rembang	Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	100%	150.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinkominfo Kab. Rembang	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100%	250.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinkominfo kab. Rembang	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100%	250.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Beberapa masukan telah dihimpun Dinas Kominfo dari media komunikasi yang dimiliki baik website, medsos dan layanan aduan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :

1. Pendampingan SDM desa dalam mengelola media komunikasi utamanya website desa (desa.id) dalam rangka keterbukaan informasi publik desa dan mewujudkan *smart village*.
2. Penyediaan konten publikasi media Kabupaten Rembang agar lebih bervariasi dan tidak kaku.
3. Penyediaan koneksi jaringan internet gratis di fasilitas publik.

Usulan tersebut sangat sinergi dengan target kinerja daerah dalam perwujudan *good government* yang berberapa aspeknya adalah keterbukaan informasi public dan kecepatan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Secara umum usulan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas Kominfo, namun untuk merealisasikannya diperlukan tahapan dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain.

Tabel 6 : Usulan Dari Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Kabupaten Rembang	1. Desa yang terbina KIP 2. Konten Publikasi informasi publik	1. 14 Kecamatan 2. Media Pemerintah	
2.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Rembang	Tersedianya internet gratis di fasillitas umum	2 Lokasi	

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**a. Kebijakan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika**

Kebijakan nasional bidang komunikasi dan informatika yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 adalah transformasi digital. Pondasi dari pengarusutamaan transformasi digital pemerintah adalah pengumpulan dan pemanfaatan big data baik oleh pemerintah maupun swasta bagi kepentingan pelayanan publik diseluruh sektor. Kebijakan ini secara operasional diuraikan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020-2024 kedalam sepuluh sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran 1-6 merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo sehingga daerah tidak dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran tersebut. Untuk sasaran 7-10 Dinas Kominfo telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yang meliputi :

1. Pendampingan perangkat desa dalam mengelola aplikasi elektronik yang nantinya dapat berperan sebagai agen masyarakat digital
2. Pelaksanaan tata kelola SPBE dalam hal aplikasi, jaringan dan data center.
3. Pengelolaan informasi publik oleh PPID, publikasi melalui media (web, medsos, dan radio), pengelolaan kemitraan dengan komunitas (KIM dan FK Metra).
4. Tata Kelola pemerintahan yang baik telah menjadi tujuan daerah.

b. Kebijakan Nasional Bidang Statistik

Kerangka kebijakan nasional bidang statistik tidak tertuang secara spesifik dalam RPJMN 2020-2024. Namun kontribusi statistik meliputi seluruh bidang pembangunan melalui penyediaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Kesesuaian program Dinas Kominfo dengan kebijakan nasional bidang statistik didapatkan dengan melihat tujuan Renstra BPS 2020-2024 yang meliputi :

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Indikator sasaran statistik Dinas Kominfo adalah persentase ketersediaan data dimana tidak lepas dari kerangka SSN dengan BPS sebagai pembina yang merupakan rujukan statistik dalam hal pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

c. Kebijakan Nasional Bidang Persandian

Kebijakan nasional bidang persandian (keamanan informasi) dalam RPJMN dinyatakan bahwa transformasi digital dalam bidang pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan

mencakup keamanan siber. Dalam Renstra BSSN telah memuat uraian pengelolaan keamanan siber yang berimplikasi hingga ke daerah yaitu terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima. Implikasinya pengelolaan keamanan informasi di pemerintah daerah harus mengacu kepada standar baku keamanan informasi yang telah ditetapkan BSSN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan penelaahan kebijakan nasional, isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi serta telaah Ranwal RKPD 2022 Kabupaten Rembang maka Dinas Kominfo menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik

Berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran sebagai berikut :

Tabel 7 : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Cakupan layanan sistem dan jaringan	1. Persentase OPD yang terkoneksi jaringan 2. Persentase aplikasi yang terintegrasi
		Indeks KAMMI	Cakupan pengamanan informasi	3. Persentase Layanan Keamanan Siber dan Sandi
2	Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP	Ketersediaan informasi publik pada media	1. Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan
			Ketersediaan data statistik sektoral	2. Persentase Ketersediaan data statistik sektoral

3.3 Program Dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 8 : Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum	Dinkominfo Kab Rembang	100%	5.384.188.000	DAU		100%	5.550.000.000
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase informasi yang disampaikan ke publik		100%	54.000.000			100%	59.400.000
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan pelayanan keuangan		100%	3.268.867.000			100%	3.707.270.800
	Admisnistrasi umum perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum		100%	237.361.000			100%	268.000.000
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur		100%	52.000.000			100%	56.000.000
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian		100%	1.658.960.000			100%	1.870.000.000
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercukupan service suku cadang dan pajak		100%	86.000.000			100%	90.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menyajikan data lengkap	Kominkominfo Kab Rembang	100%	897.000.000	DAU		100%	910.000.000
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah informasi dan dokumentasi yang terkelola		100%	897.000.000			100%	910.000.000
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase komponen layanan SPBE yang sudah terintegrasi	Kominkominfo Kab Rembang	100%	2.750.000.000	DAU		100%	2.800.000.000
	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase terselenggaranya operasional domain dan sub domain kab rembang		100%	100.000.000			100%	120.000.000
	Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan tata kelola SPBE		100%	2.650.000.00			100%	2.700.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Kominkominfo Kab Rembang	100%	150.000.000	DAU		100%	165.000.000
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase publikasi data statistik yang tersusun		100%	150.000.000			100%	165.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	Kominkominfo Kab Rembang	100%	250.000.000	DAU		100%	300.000.000
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	penyelenggaraan berita daerah yang lancar, aman dan terjaga keamanannya		100%	250.000.000			100%	300.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dinas Kominfo Kabupaten Rembang pada tahun 2022 mempunyai 5 program, 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) program penunjang (sekretariat),
- b. 2 (dua) program urusan komunikasi dan informatika,
- c. 1 (satu) program urusan statistik dan
- d. 1 (satu) program urusan persandian.

Tabel 9 : Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27,000,000	DAU
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen Renja dan Renstra	2 dokumen	15,000,000	DAU
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan	3 dokumen	7,000,000	DAU
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi sakup, evaluasi renja triwulan I,II,III,IV	4 dokumen	5,000,000	DAU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,446,163,000	DAU
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 ASN	12 bulan	3,235,043,000	DAU
2	16	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Penatus	3 dokumen	206,120,000	DAU
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan 2 semester	1 dokumen	5,000,000	DAU
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			92,000,000	DAU
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lampu,kabel dan saklar	14 jenis	8,000,000	DAU
2	16	1	2.02	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	banner,umbul2,geroba k dorong dan pemotong rumput	48 m	6,000,000	DAU
2	16	1	2.02	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	perlengkapan kebersihan	43 jenis	10,000,000	DAU
2	16	1	2.02	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	manmin tamu,rapat dan pegawai	165 orang	20,000,000	DAU
2	16	1	2.02	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cetak, Foto copy dan jilid	18,806 exemplar	7,000,000	DAU
2	16	1	2.02	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar dan iklan	268 exemplar	6,000,000	DAU
2	16	1	2.02	7	Penyediaan Bahan/Material	ATK	55 jenis ATK	15,000,000	DAU
2	16	1	2.02	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas luar daerah	30 DL	20,000,000	DAU
2	16	1	2.02		pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Uji Kompetensi ASN (belum masuk SIPD)		-	DAU
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40,000,000	DAU
2	16	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	printer dan komputer all in one	5 komputer dan printer	30,000,000	DAU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	AC	2	10,000,000	DAU
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,658,960,000	DAU
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai, perangko dan benda pos	75 materai	1,920,000	DAU
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	listrik dan internet	12 bulan	774,840,000	DAU
						belanja internet service provider(POKIR)			
					Penyediaan internet service provider			275,000,000	DAU
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honor THL dan tenaga teknis	26 orang	607,200,000	DAU
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			82,500,000	DAU
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 sepeda motor dan 3 roda 4	20 kendaraan dinas	39,000,000	DAU
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tinta, service printer, komputer	35 barang	15,000,000	DAU
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor	8 ruang	15,000,000	DAU
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	service AC dan suku cadang, mebel dan genset	18 AC	13,500,000	DAU
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			540,000,000	DAU
2	16	2	2.01		perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik				DAU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	honor tim kominfo dan organisasi		20,000,000	DAU
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	pembuatan konten, website	790	90,000,000	DAU
2	16	2	2.01	5	Pengelola Media Komunikasi Publik	radio (honorarium direktur, belanja kebutuhan kantor, belanja jaringan, iklan/banner, nara sumber, honor tim, belanja seragam dan hadiah)	9855 siar	146,500,000	DAU
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	honor PPID	12 dok	20,000,000	DAU
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	3 media (jumpa pers/coffe morning, iklan/banner)	1400 dok	213,500,000	DAU
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	bintek, lomba	2	-	DAU
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	FK Mitra, karnaval, expo, belanja modal kemitraan komunitas)	4	50,000,000	DAU
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			75,000,000	DAU
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	bayar langganan domain (1 domain), 295 domain dan lisensi	327	75,000,000	DAU
2	16	3	2.01		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1,610,000,000	DAU
2	16	3	2.01	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	dipihak ketigakan (dok arsitektur SPBE)	4	100,000,000	DAU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6
2	16	3	2.01	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	server 400jt, rehap pendataan data center 200jt, untuk rak server 100jt, mini control 200jt, perawatan fiber optik 400jt	100%	985,000,000	DAU
2	16	3	2.01	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	penyusunan/pengembangan aplikasi (simantra dan srikandi)	2		DAU
2	16	3	2.01	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	penyusunan aplikasi smartcity, penadaan sarpras pendukung smart city	3	500,000,000	DAU
2	16	3	2.01	10	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	jumlah SDM TIK yang meningkat kompetensinya	2 kali	25,000,000	DAU
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			56,760,000	DAU
2	20	2	2.01		peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral				DAU
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	rapat koordinasi 3 kali	5	50,000,000	DAU
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	bimtek 2 kali	3	6,760,000	DAU
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			50,000,000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6				
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	pelaksanaan audit aplikasi, TIK dan keamanan	100%		DAU
2	21	2	2.01	4	Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		50%	50,000,000	DAU
TOTAL								7,678,383,000	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022, mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2022, dan berbagai dokumen terkait bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik. Penyusunan Renja ini telah mempertimbangkan masukan melalui pendekatan teknokratis dan demokratis serta memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu strategis dalam menyusun tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam mewujudkan pelayanan pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang semakin komprehensif dan terpadu ini, diharapkan kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dapat semakin terfokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.